

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materill dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
- , 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education. Yogyakarta.
- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Chairul Huda. 2011. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Damsar, Indrayani. 2018. *Pengantar Sosiologi Pasar*. Kencana. Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Kencana. Jakarta.
- Indriati, Arif Widiyatmoko. 2008. *Pasar Tradisional*. Alprin. Semarang.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2015. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Juni Sjafrien Jahja. 2012. *Say No To Korupsi!*. Visimedia. Jakarta.
- Juniver Girsang. 2012. *Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*. JG Publishing. Jakarta.

- Jur. Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi*. KPK. Jakarta.
- , 2009. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*. KPK. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2007. *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*. Djambatan. Jakarta.
- , 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Nanang T. Puspito, et al. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kemendikbud. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. PT Alumni. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cahya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Tina Asmarawati. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. CV Budi Utama. Yogyakarta.

Titon Slamet Kurnia *et al.* 2013. *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Reorientasi*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Warso Sasongko. 2017. *Korupsi*. Relasi Inti Media. Yogyakarta.

Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Artikel**

Fathur Rahman, *et al.*, "Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintahan Desa". *Integritas Jurnal Antikorupsi*, volume 4, nomor 1, 2018.

Hariman Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam". *Mimbar Hukum*, volume 28, nomor 2, 2016.

Tamala Sari Martha Prakoso, "Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Recidive*, volume 3, nomor 1, 2014.

Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi Universitas Jambi*, volume 2, Nomor 1, 2011.

<https://nasional.kontan.co.id/news/icw-menyebut-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020> diakses pada 26 Oktober 2020.

<http://www.kejaksaan.go.id/upliming/Peran%20PNS%20dalam%20membangun%20budaya.ppt> diakses pada 22 Maret 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.